

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV **DES**
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 **26** 27 28 29 30 31

HALAMAN : T6

TAHUN 2006

Negara berpotensi rugi ratusan juta dolar AS

Tim Lelang PLN abaikan sejumlah faktor

Oleh BAMBANG DWI DJANUARTO,
Bisnis Indonesia

JAKARTA: Hasil mediasi lelang PLTU Suralaya dan PLTU Paiton yang dilakukan Tim Percepatan Pembangunan PLTU 10.000 MW menunjukkan PT PLN mengabaikan banyak faktor yang dapat berpotensi mengakibatkan kerugian negara.

Hal tersebut terungkap dalam dokumen Tim Percepatan Pembangunan PLTU 10.000 MW (Tim Perpres 72/2006) No. 103/XII/2006 tentang Mediasi Hasil Lelang PLTU Suralaya dan PLTU Paiton yang bersifat Rahasia tertanggal 20 Desember 2006 yang ditandatangani Ketua Pelaksana Harian Tim Perpres 72/2006 Yogo Pratomo.

Dalam dokumen tersebut, Yogo menegaskan data teknis yang diajukan penawar belum disetarakan oleh Tim Lelang PT PLN pada Tahap I sehingga pada waktu perhitungan harga pada Tahap II harga penawaran tidak dapat dibandingkan satu sama lain (*apple to apple*).

Contoh yang paling signifikan adalah bahwa untuk memenuhi persyaratan emisi semestinya CNTIC harus

menggunakan FGD (*flued gas desulfurize*) dan harus masuk dalam perhitungan harga.

"Namun, Tim Lelang PT PLN tidak memperhitungkan hal tersebut. Akibatnya harga CNTIC lebih rendah dari yang seharusnya," tulis Yogo dalam dokumen yang ditujukan kepada Menko Perekonomian selaku Ketua Tim Perpres 72/2006.

Dalam dokumen peserta tender yang lain untuk PLTU Suralaya, Dongfang memasukkan harga FGD sebesar US\$9,8 juta ditambah Rp25 miliar sedangkan Shanghai Electric memasukkan harga FGD sebesar US\$30 juta.

Jika menggunakan hitungan yang seimbang, harga CNTIC (China National Technical Import & Export Corp) dengan FGD untuk tingkat

polusi 1.200 mg/m³ senilai US\$26,7 juta ditambah Rp8,9 miliar, maka harga listrik CNTIC menjadi Rp381,41 per kWh, jauh di atas harga perhitungan panitia lelang PT PLN yang hanya Rp378,26/kWh.

PLTU Paiton

Sementara untuk lelang PLTU Paiton Baru (PLTU 1 Banten), Tim Percepatan Pembangunan PLTU 10.000 MW memutuskan penyelesaian waktu konstruksi yang lebih cepat seharusnya dijadikan pertimbangan Tim Lelang sesuai dengan tujuan program percepatan ini.

"Namun, hal ini diabaikan sehingga kesempatan untuk mendapatkan pembangkit non-BBM secepatnya tidak diperhitungkan," tulis Yogo.

China Huadian menawarkan penyelesaian lebih cepat delapan bulan untuk PLTU Paiton sehingga ada penghematan sebesar US\$400 juta, namun PLN justru memenangkan Harbin Power yang penyelesaiannya memakan waktu 36 bulan.

Tanggapan Pelaksana Harian Tim Perpres 72/2006

- Penyelesaian waktu lebih cepat hingga hemat US\$400 juta harus diperhitungkan karena penghematan menja di alasan dilakukan program percepatan PLTU.
- Kandungan lokal paling tinggi harus dapat *credit point* agar penawar menggunakan produk lokal setinggi mungkin.
- PLN harus menyadari risiko yang akan muncul.
- Sertifikasi internasional untuk *code and standard* dari China tidak ada.
- Angka net plant heat rate CNTIC 2176 Kcal/kWh menggunakan tinta berbeda dengan cetakan huruf lainnya di seluruh dokumen, menimbulkan kecurigaan.
- Emisi melebihi ambang batas sehingga harus menggunakan FGD dan dimasukkan dalam biaya dasar CNTIC.

Sumber: Dokumen Tim Perpres

Sebelumnya, PLN telah menetapkan CNTIC sebagai calon pemenang PLTU Suralaya dan Harbin Power untuk PLTU Paiton.

Seorang eksekutif yang mengetahui seluruh dokumen lelang tersebut mengatakan penghematan sebesar US\$400 juta itu bisa menjadi kerugian negara jika PT PLN memaksakan Harbin Power untuk menang.

Ketua Pelaksana Harian Percepatan Pembangunan PLTU 10.000 MW Yogo Pratomo yang berusaha di-

konfirmasi *Bisnis*, tidak menyalakan telepon selulernya dan tidak memberikan jawaban pesan layanan singkat yang dikirim.

Hasil mediasi lelang PLTU Suralaya dan PLTU Paiton merupakan tindak lanjut rapat yang dipimpin oleh Wapres Jusuf Kalla dihadiri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro, Meneg BUMN Sugiharto, dan Dirut PT PLN Eddie Widiono Suwondho pada 11 Desember

2006.

Pekan lalu, Dirut PLN Eddie Widiono se usai rapat dengan Tim Percepatan Pembangunan PLTU 10.000 yang dipimpin Menko Perekonomian Boediono berkeras PLN akan mempertahankan CNTIC dan Harbin sebagai pemenang.

Eddie bahkan menantang untuk melaporkan kepada pihak yang lebih tinggi jika hasil lelang PLN tidak memuaskan. (08) (dwi.djanuarto@bisnis.co.id)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV **DES**
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 **26** 27 28 29 30 31

HALAMAN : 1

APPBI akan mengadu ke Menkeu

TAHUN 2006

Reimbursement listrik kena PPN

Oleh PARWITO
Bisnis Indonesia

JAKARTA: Ketentuan yang diterbitkan Ditjen Pajak menyangkut pengenaan PPN atas penggantian biaya (reimbursement) listrik dinilai salah, karena berdasarkan PP tentang barang strategis listrik termasuk bebas PPN.

Dalam PP No. 12/2001 tentang Impor dan atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai, terakhir direvisi dengan PP No. 43/2002, disebutkan listrik, kecuali untuk perumahan dengan daya di atas 6.600 watt, termasuk barang kena pajak yang dianggap strategis sehingga atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai.

Namun, dalam surat yang ditujukan kepada PT LMIR, Direktur PPN Ditjen Pajak A. Sjarifuddin Alsah (kini Sekditjen Pajak) menyatakan biaya penggantian atau *reimbursement* atas pembayaran listrik yang dilakukan terlebih dulu oleh pengelola gedung untuk penyewa atau *tenant* termasuk jasa kena pajak yang terutang PPN.

Seorang pengurus Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) mengakui asosiasinya te-

ngah membahas masalah tersebut menyusul adanya pengaduan dari salah satu anggotanya yang merasa dirugikan akibat ketentuan tersebut.

"Dalam waktu dekat, APPBI akan mengirim surat ke Menteri Keuangan untuk menanyakan mengenai pengenaan PPN untuk tagihan penggantian pemakaian biaya listrik," ujar pengurus APPBI yang enggan disebut namanya kepada *Bisnis*, tadi malam.

Dalam surat yang dikirim ke Ditjen Pajak, PT LMIR menjelaskan sebagai pengelola gedung perkantoran dan apartemen setiap bulan membuat tagihan atas pemakaian listrik oleh *tenant* yang besarnya sama dengan tagihan yang dikeluarkan oleh PLN. Perusahaan tersebut hanya menggunakan satu gardu listrik untuk seluruh gedung. Pada saat melakukan penagihan (*reimbursement*) kepada para *tenant* tersebut, PT LMIR tidak mengenakan PPN hanya menagih se-

besar tagihan dari PLN.

Atas pertanyaan tersebut, Direktur PPN Ditjen Pajak dalam suratnya menyatakan sebagai berikut.

Pertama, berdasarkan UU PPN diatur a.l. Pasal 1 angka 7 menyatakan dasar pengenaan pajak adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menkeu yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

Kedua, Pasal 1 angka 19 menyatakan bahwa penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan jasa kena pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut UU ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

Ketiga, Pasal 4 huruf C menyatakan PPN dikenakan atas penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.

"Atas dasar itu, *reimbursement* atau penagihan kembali nilai tagihan pemakaian listrik baik nilai tagihannya sama ataupun lebih besar daripada tagihan oleh PLN terutang PPN karena pada dasarnya *reimbursement* itu

merupakan bagian dari kegiatan penyerahan jasa kena pajak berupa persewaan perkantoran dan apartemen yang dilakukan oleh *tenant*,” ujar Direktur PPN dalam surat itu.

Dalam surat lainnya disebutkan pengenaan PPN atas biaya penggantian tidak hanya sebesar nilai *mark up*, tapi seluruh nilai penggantian. Sebab tagihan listrik (termasuk juga air oleh PDAM) merupakan bagian dari kegiatan penyerahan jasa kena pajak berupa persewaan ruangan.

Gugat

Seorang konsultan pajak yang berkantor di Jakarta Pusat menyatakan nilai penggantian memang bisa dijadikan dasar pengenaan pajak, jika atas barang dan jasa tersebut memang terutang pajak. Tapi jika barang atau jasa tersebut memang bebas pajak, maka nilai penggantian tersebut tidak bisa dijadikan dasar pengenaan pajak.

“Kalau dilihat substansinya seharusnya tidak kena pajak

karena listrik memang bebas pajak. Tapi saya mesti pelajari dulu,” katanya. Jika wajib pajak merasa dirugikan akibat ketentuan itu, dia menyarankan agar mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak.

Sekretaris Ditjen Pajak A. Sjarifuddin Alsah yang dihubungi tadi malam memilih mematikan telepon genggamnya. Sementara, Direktur Penyuluhan Perpajakan Erwin Silitonga mengatakan akan mempelajari lebih lanjut implikasi PP No. 12/2001 terhadap surat tersebut.

“Secepatnya akan kami sampaikan sikap kami, bagaimana implikasi PP itu. Tapi kalau Anda tanyakan sekarang, kurang lebihnya pandangan saya sama dengan isi surat Pak Sjarifuddin [Surat No. S-812/PJ.53/2005],” kata Erwin, tadi malam. (NENENG HERBAWATI/BASTANUL SIREGAR) (parwito@bisnis.co.id)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV **DES**
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 **26** 27 28 29 30 31

HALAMAN : VII

TAHUN 2006

2007 Pemerintah Alokasikan Subsidi Listrik 25,8 Triliun

Jakarta, RM

Sebagai dampak dari kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan tidak menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL) untuk jangka waktu tertentu, tahun 2006 pemerintah telah mengalokasikan subsidi listrik sebesar Rp 31,2 triliun. Sedangkan untuk tahun 2007, pemerintah mengalokasikan subsidi listrik sebesar Rp 25,8 triliun.

"Besarnya kebutuhan dana subsidi ini terutama diakibatkan oleh naiknya biaya pembangkitan tenaga listrik yang saat ini masih mengkonsumsi 9,6 juta kiloliter (kl) BBM atau 25 persen dari kebutuhan energi primer PLN," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro ketika membuka Lokakarya

Penerapan Tarif Regional di Jakarta.

Dia mengatakan, kenaikan biaya pembangkitan tersebut sebagian besar ditimbulkan oleh biaya pengadaan BBM, yaitu sekitar 76,8 persen dari total biaya pengadaan energi primer untuk pembangkitan tenaga listrik saat ini.

Untuk mengurangi beban subsidi tersebut, kata Purnomo, pemerintah terus mendorong PLN untuk meningkatkan efisiensi di setiap segmen usaha. Di antaranya mempercepat pengurangan konsumsi BBM sebagai energi primer pembangkit tenaga listrik BBM dengan pembangkit berbahan bakar non-BBM, utamanya batubara berkalori rendah dengan total kapasitas 10.000 mega watt (MW).

Pembangunan pembangkit tenaga listrik berbahan bakar batubara tersebut, meliputi 6.900 MW sampai 8.900 MW di sistem Jawa-Madura-Bali (Jamali) dan sisanya sebesar 1.011 MW sampai dengan 1.261 MW di sistem di luar Jamali.

Menyinggung tarif listrik regional, Purnomo menegaskan, penerapan tarif listrik regional tidak ditujukan untuk menutup kerugian yang dialami PLN dalam proyek listrik bagi masyarakat. Tapi ditujukan untuk mendorong kemandirian wilayah setempat dalam menyediakan dana pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik.

Dia mengingatkan, agar penerapan tarif regional di suatu wilayah atau sistem ketenagalistrikan dapat berjalan dengan baik, maka sebelum diterapkan perlu dilakukan kajian secara mendalam yang mempertimbangkan aspek kemampuan masyarakat/pelanggan, aspek kesiapan/dukungan Pemda dalam penyediaan dana subsidi listrik.

Selain itu, juga diperlukan kajian terhadap kesiapan PLN dan pemegang saham PLN untuk memisahkan wilayah usahanya menjadi institusi/anak perusahaan yang mandiri. "Yang lebih penting lagi adalah apakah penerapan tarif regional ini terbatas dalam wilayah administratif pemerintahan yang terisolasi dan dalam rentang layanan sistem penyediaan tenaga listrik," ucap Purnomo. ■ MAF

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input checked="" type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA		<input type="checkbox"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>																												
KODE : <input checked="" type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS		<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI		<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM																										
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HALAMAN : 16											TAHUN 2006																			

Investasi listrik US\$41 miliar

BISNIS INDONESIA

JAKARTA: PT PLN memperkirakan dana yang diperlukan untuk membangun infrastruktur listrik selama 2006 sampai 2015 mencapai US\$41 miliar.

Eddie Widiono, Dirut PT PLN, mengatakan jumlah investasi itu dibutuhkan untuk pembangunan pembangkit US\$26,36 miliar, transmisi US\$7 miliar, dan distribusi US\$8 miliar.

"Jumlah tersebut untuk total seluruh Indonesia," ujarnya saat memaparkan kelistrikan Indonesia dalam pertemuan dengan Vice Chairman of National Development and Reform Commission (NDRC) China di Jakarta, akhir pekan lalu.

Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen Energi

dan Sumber Daya Mineral, J. Purwono, mengatakan perkiraan jumlah tersebut sudah termasuk di dalamnya perkiraan investasi untuk pembangkit 10.000 MW, sekaligus transmisi serta distribusinya.

Menurut dia, kebutuhan dana tersebut dapat saja dipenuhi oleh pemerintah atau swasta. "Pemerintah termasuk juga PLN."

Dia menuturkan diharapkan PLN dapat memenuhi lebih dari 50% dalam pembangunan pembangkit, misalnya, PLN dapat membangun 70% dari porsi pembangkit.

Purwono menuturkan PLN dan pemerintah lebih fokus kepada pembangunan transmisi dan distribusi, sementara itu swasta diharapkan berin-

vestasi dalam pembangkit. "Baik investor swasta asing maupun lokal, kami fokuskan kepada pembangkit."

Menurut dia, pada kesempatan tersebut swasta China sangat tertarik berinvestasi di bidang kelistrikan karena padat modal.

Bagi investor, besar atau kecil jumlah investasi sementara usahanya sama, maka mereka lebih memilih investasi besar karena akan mendapatkan keuntungan lebih besar. "Jadi secara bisnis, wajar investor tertarik ke listrik."

Dia menuturkan bagi investor swasta yang berminat, yang penting untuk dipenuhi adalah kepastian pendanaan atau komitmen dari perbankan. (09)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input checked="" type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA			<input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>																											
KODE : <input checked="" type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS		<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI		<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM																										
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HALAMAN : 16											TAHUN 2006																			

PLN Jateng rugi Rp2,7 triliun

SEMARANG: PT PLN Distribusi Jateng dan DIY selama 2006 mengalami kerugian Rp2,7 triliun akibat rendahnya harga jual listrik yang hanya Rp581 per kWh, atau jauh di bawah biaya pokok penyediaan (BPP) yang menghabiskan dana Rp942,207 per kWh.

Dadan Kurni Dipura, Manajer Niaga PLN Distribusi Jateng dan DIY, mengatakan biaya pembelian listrik tersebut merupakan komponen terbesar pada operasional PLN, sehingga total dana yang dikeluarkan tidak sebanding dengan perolehan dari hasil penjualan listrik kepada pelanggan.

"Hal itu selama ini yang belum diketahui dan dipahami masyarakat luas, sehingga harga jual sulit dinaikkan, sedangkan piutang atau tagihan PLN juga cukup besar," ujarnya, akhir pekan lalu. (BISNIS/BAR/RSJ)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA FEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV **DES**
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 **26** 27 28 29 30 31

HALAMAN : 6

TAHUN 2006

PEMBANGKIT LISTRIK

Swasta Diizinkan Perluas Kapasitas

JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah mengizinkan semua pembangkit listrik milik swasta (*independent power producer/IPP*) untuk mengajukan perluasan atau penambahan kapasitas kelistrikan. Selanjutnya, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) akan menyeleksi IPP yang dinilai layak meningkatkan kapasitas yang disesuaikan dengan kebutuhan jaringan.

"Semua (IPP—*Red*) ditawarkan, atau sebaliknya pihak swasta bisa minta kepada PLN. Itu sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2006 tentang Penyediaan Listrik. Sepanjang PLN membutuhkan listrik pasti akan diserap," kata Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi (LPE) Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral J Purwono di Jakarta, akhir pekan lalu.

Menurut Purwono, PLN membutuhkan perluasan pembangkit terutama di daerah-daerah kekurangan da-

ya listrik. Saat ini, PLN menunggu IPP di daerah tersebut untuk mengajukan perluasan. Selain Jawa, IPP di Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera juga bisa mengajukan perluasan. Di mana, beberapa IPP di luar Jawa yang bisa melakukan perluasan, di antaranya pembangkit listrik tenaga gas dan uap (PLTGU) Sengkang, Sulawesi Selatan dan PLTGU Palembang Timur, Sumatera Selatan.

"Tergantung kebutuhan sistem, kalau membutuhkan bisa segera. Di Jawa dan mana saja membutuhkan listrik, Sumatera juga bisa. Pembangkit batu bara dan gas bisa," ujar Purwono.

Sementara itu, perluasan kapasitas pembangkit yang sangat dibutuhkan saat ini ada tiga, yaitu Paiton sebesar 800 megawatt (MW), Tanjung Jati B 1.200 MW, dan Cilacap 600 MW. Jenis pembangkit untuk Paiton 2x400 MW, Tanjung Jati B 2x600 MW, dan Cilacap 2x300 MW atau 1x600 MW.

Untuk Paiton, kata Purwono, PLN akan mengadakan uji kelayakan, karena ada tiga kontraktor di tempat tersebut, yaitu PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB), Jawa Power, dan Paiton Energy. PLN sudah menyatakan minatnya pada ketiga perusahaan tersebut dan menunggu ketiganya menyampaikan penawaran. "Siapa yang antara tiga ini yang memberikan penawaran lebih baik bagi PLN, maka akan ditunjuk," tuturnya.

Menurut Purwono, konsep pembelian listrik oleh PLN melalui amandemen kontrak, karena merupakan perluasan dari proyek sebelumnya. Harga listrik proyek perluasan harus lebih rendah dari proyek sebelumnya. "Jadi kita beri amandemen, kita tambah kapasitas dengan amandemen kontrak, tapi mereka harus menurunkan harganya. *Win-win solution* (saling menguntungkan—*Red*)," katanya. (Abdul Choir)

6

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV **DES**
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 **26** 27 28 29 30 31

HALAMAN : 416

TAHUN 2006

Jembatan Layang Ciputat Terhambat Jaringan Listrik

TANGERANG — Bupati Tangerang Ismet Iskandar menilai pembangunan jembatan layang Ciputat saat ini mengalami kendala pemindahan jaringan listrik milik Perusahaan Listrik Negara. Sebab, untuk pemindahan kabel dan tiang listrik di lokasi yang akan dibangun jembatan layang itu, PLN menuntut ganti rugi Rp 3 miliar. "Ini sangat memberatkan kami, tentu saja, saya tidak akan menuruti permintaan itu," kata Ismet kepada wartawan kemarin.

Ismet mengemukakan, "Jika PLN mempersulit hal ini, saya juga akan mempersulit perizinan proyek PLN yang ada di Kabupaten Tangerang," katanya. Pihaknya, menurut Ismet, telah mengirimkan surat langsung kepada PLN pusat agar memberikan toleransi dengan

tidak mempersulit pemindahan jaringan. "PLN pusat sudah kami surati, tapi belum ada tanggapan," ujarnya.

Menurut dia, lahan untuk jembatan layang itu sudah dibebaskan 100 persen. Pengosongan lahan dengan merobohkan bangunan yang ada di lokasi telah dilakukan sejak beberapa bulan lalu. Kini tinggal proses pemindahan jaringan Telkom dan PLN. "Telkom sudah oke tanpa harus ada ganti rugi, tapi PLN belum memberikan kepastian," kata Ismet.

Deputi Manajer Komunikasi PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Azwar Lubis mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum mengetahui keberatan yang dikeluhkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang itu. "Hingga kini kami belum mengetahui masa-

lah ini karena masalahnya belum jelas," ujarnya.

Pembangunan jembatan di Jalan Dewi Sartika, Ciputat, ini, kata Ismet, merupakan salah satu solusi mengatasi kemacetan lalu lintas di wilayah tersebut. "Karena itu, kebutuhan akan *flyover* tidak dapat ditunda-tunda lagi," kata Ismet.

Jembatan layang Ciputat merupakan program bantuan dari Japan Bank International Corporation senilai Rp 100 miliar. "Kontraktornya sudah ada, yaitu Obayashi dari Jepang," ujar Ismet. Nantinya, jembatan layang sepanjang 700 meter ini dibangun dari pusat perbelanjaan Ramayana di Jalan Raya Djuanda hingga pompa bensin bahan bakar umum di Jalan Raya Dewi Sartika, Ciputat.

● JONIANSYAH

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV **DES**
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 **26** 27 28 29 30 31

HALAMAN : 15

TAHUN 2006

BISNIS KELISTRIKAN

IPP Boleh Ajukan Perluasan

JAKARTA (SINDO) – Pemerintah menyatakan semua pembangkit listrik swasta (*independent power producer/IPP*) secara prinsip boleh mengajukan perluasan atau penambahan kapasitas pembangkit yang dioperasikannya. Namun, hal itu bergantung pada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN persero) sebagai pembeli listrik yang akan menyesuaikan rencana pengembangan oleh IPP dengan kebutuhan jaringan.

"Semua (IPP) ditawarkan atau sebaliknya, swasta bisa minta kepada PLN, kan ada Peraturan Pemerintahnya Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penyediaan Listrik. Sepanjang PLN membutuhkan listrik, (tambahan pasokan dari pengembangan IPP) pasti akan diserap," kata Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) J Purwono di Jakarta, belum lama ini.

Menurut Purwono, PLN juga membutuhkan perluasan

pembangkit, terutama di daerah-daerah yang jaringannya masih kekurangan daya. Saat ini, kata dia, PLN menunggu permintaan IPP di daerah-daerah yang masih kekurangan pasokan listrik untuk mengajukan perluasan pembangkitnya. Dengan demikian, kata dia, selain di Jawa, IPP yang beroperasi di Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera bisa mengajukan perluasan. Purwono mencontohkan, beberapa IPP di luar Jawa yang bisa melakukan perluasan di antaranya Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Sengkang dan PLTGU Palembang Timur. "Jadi itu tergantung kebutuhan sistem, kalau sistem membutuhkan, ya bisa," tegas dia.

Lebih jauh, Purwono mengatakan bahwa kebutuhan perluasan yang saat ini dirasakan sangat dibutuhkan adalah di tiga IPP, yaitu PLTU Paiton sebesar 800 MW, PLTU Tanjung Jati B sebesar 1.200 MW, dan PLTU Cilacap sebe-

sar 600 MW. Untuk Paiton, lanjut dia, PLN akan mengadakan *beauty contest* karena ada tiga kontraktor yang mengoperasikan pembangkit tersebut, yaitu PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB), Jawa Power, dan Paiton Energy. PLN, ujar dia, sudah menyatakan keinginannya pada ketiga perusahaan tersebut dan menunggu ketiganya menyampaikan penawaran.

"Siapa di antara bertiga yang memberikan *offer* lebih baik bagi PLN, itu yang akan ditunjuk," imbuh dia.

Lebih lanjut, Purwono menjelaskan bahwa konsep pembelian listrik dari perluasan yang dilakukan IPP adalah dengan mengamendemen kontrak sebelumnya. Namun, imbuh dia, pemerintah meminta harga jual listrik dari proyek perluasan harus lebih rendah dari harga jual sebelumnya mengingat proyek perluasan tidak memerlukan biaya sebesar proyek awal.

Pertumbuhan Pelanggan PLN

Terkait dengan ketersediaan pasokan listrik, PLN menyatakan hal itu untuk mempertahankan tingkat pertumbuhan pelanggan sebesar 6,28% per tahun atau sekitar 1,35 juta pelanggan. Saat ini, total pelanggan PLN untuk semua kategori mencapai 34 juta pelanggan. "Pertumbuhan pelanggan tersebut sudah termasuk penyambungan baru," kata Direktur Niaga dan Pelayanan PLN Sunggu Anwar Aritonang di Jakarta.

Sunggu menjelaskan, tahun ini PLN berhasil meraih tambahan hingga 16 juta pelanggan. Hal itu, kata dia, terjadi karena banyak sektor beralih menjadi pelanggan PLN pas-cakenaikan bahan bakar minyak (BBM). PLN, lanjut dia, berhasil menampung tambahan jumlah pelanggan tersebut setelah berhasil mengurangi susut jaringan (*losses*) menjadi 11,4%. Tahun depan, sambung dia, susut jaringan ditargetkan turun menjadi 10,4%.

"Tapi penurunan susut jaringan juga sangat tergantung besarnya investasi. Pada 2006 misalnya, PLN terpaksa melakukan revisi target susut jaringan dari 10,2% menjadi 11,4% karena dari investasi susut yang disiapkan sebesar Rp5,4 triliun, Rp2,1 triliun terpaksa digunakan untuk beli BBM," jelasnya.

Tahun 2007, lanjut dia, PLN berharap investasi untuk mengurangi susut jaringan yang ditetapkan Rp5 triliun bisa terserap seluruhnya. PLN optimistis dana tersebut tidak akan terserap lagi untuk penggunaan BBM karena ada tiga pembangkit baru yang masuk sistem Jawa-Madura-Bali (Jamali), yaitu PLTU Cilegon, Cilacap, dan Tanjung Jati B.

Aritonang mengatakan, dengan terserapnya seluruh investasi susut, kondisi jaringan dipastikan makin membaik, sehingga bisa mendukung pencapaian target 1,35 juta pelanggan tahun depan.

(ahmad senoadi)

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV **DES**
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 **26** 27 28 29 30 31

HALAMAN : 20

TAHUN 2006

Terganjil Listrik FO Ciputat

Bupati Kecewa, PLN Minta Ganti Rugi Rp3 Miliar

TANGERANG (SINDO) - Bupati Tangerang Ismet Iskandar mengaku bahwa proyek pembangunan *flyover* (FO) Ciputat terganjal persoalan pemindahan jaringan listrik milik PLN. Sebab, untuk pemindahan kabel dan tiang listrik di lokasi itu, PLN menuntut ganti rugi Rp3 miliar. "Ini sangat memberatkan kami. Tentu saja saya tidak akan menuruti permintaan itu," ucap Ismet, kemarin.

Karena itu, jika PLN tetap *ngotot* tidak mau diajak bekerja sama dalam merealisasikan pembangunan jembatan layang itu, Ismet mengancam akan mempersulit pembangunan proyek PLN di Kabupaten Tangerang. Salah satunya, pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Desa Lontar, Kecamatan Sukadiri. "Jika PLN mempersulit hal ini, saya juga akan memper-

sulit perizinan proyek PLN yang ada di Kabupaten Tangerang," ancam Ismet.

Untuk mengatasi masalah ini, Ismet telah mengirimkan surat ke PLN Pusat agar segera memindahkan jaringan tanpa meminta ganti rugi Rp3 miliar. "PLN pusat *sih* sudah kami surati, tapi belum ada tanggapan," paparnya.

Sebenarnya, kata dia, pembebasan lahan dan bangunan proyek jembatan layang itu sudah selesai semua sejak beberapa bulan lalu. Namun, hanya karena persoalan jaringan listrik, hingga kini proyek terganjal. "Kini tinggal proses pemindahan jaringan Telkom dan PLN. Telkom sudah oke, tanpa harus ada ganti rugi, tapi PLN belum memberikan kepastian," katanya.

Padahal, kata Bupati, *flyover* itu mendesak untuk di-



bangun. Apalagi, warga Ciputat telah menunggu proyek itu agar lalu lintas di kawasan Jalan Dewi Sartika, Ciputat, lancar. "Kontraktornya sudah ada yaitu Obayashi dari Jepang. Makanya, kami ingin segera memulai pembangunan *flyover* tersebut," ucap Ismet. Perlu diketahui, rencana semula program *flyover* akan dibangun pada awal 2004 lalu hingga November 2006.

"Jika PLN mempersulit hal ini, saya juga akan mempersulit perizinan proyek PLN yang ada di Kabupaten Tangerang."

ISMET ISKANDAR
Bupati Tangerang

Namun, karena terbentur berbagai persoalan, termasuk proses pembebasan lahan, hingga kini *flyover* belum juga terwujud.

Sejauh ini, Pemkab telah menghabiskan dana sebesar Rp43 miliar untuk membebaskan lahan tersebut. "Nilai pembebasannya sesuai NJOP, yakni Rp1,4 juta per meternya," tandas Ismet. Dia yakin, keberadaan *flyover* tersebut

akan mengatasi kemacetan lalu lintas wilayah Selatan Jakarta dan Tangerang.

Sebab, selama ini kemacetan di kawasan Ciputat sangat memprihatinkan. *Flyover* ini diprediksikan akan menelan dana Rp100 miliar. Sebagian, dana itu berasal dari Japan Bank for International Cooperation (JBIC). "Lokasi ini hanya sekitar satu kilometer dari pasar Ciputat," jelasnya.

Deputi Manajer Komunikasi PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Azwar Lubis mengatakan, hingga saat ini belum mengetahui persis persoalan pemindahan jaringan listrik tersebut. Namun, dia berjanji akan menindaklanjuti keluhan Bupati Tangerang.

"Kami belum mengetahui duduk persoalannya secara jelas. Tetapi, kami akan membahas masalah pemindahan listrik dengan pejabat PLN lainnya," tandas Azwar. (denny)

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV **DES**
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 **26** 27 28 29 30 31

HALAMAN : 9

TAHUN 2006

2.970 Kasus Pencurian Listrik

PENCURIAN listrik di wilayah Kota Depok terbilang tinggi. Selama 2006 ditemukan 2.970 kasus pencurian dengan kerugian yang mencapai miliaran rupiah.

Mayoritas pencurian itu dilakukan masyarakat untuk keperluan rumah tangganya. "Tapi bukan berarti perusahaan juga tidak mencuri. Kami menemukan ada dua perusahaan yang terbukti mencuri dan sedang diadili di Pengadilan Negeri Depok," kata Manajer Area Pelayanan Jaringan PLN Kota Depok Hadi Suhana kepada wartawan di sela-sela acara penanaman pohon di Depok, Sabtu (23/12) lalu.

Menurut Hadi, modus pencurian itu dilakukan dengan cara mencantolkan kabel pada tiang instalasi listrik yang terpasang di tengah permukiman. (SH/J-2)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV **DES**
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 **26** 27 28 29 30 31

HALAMAN : 3

TAHUN 2006

PLN
Optimistis
Tumbuh 6,28%

JAKARTA (Media): PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) optimistis dapat melayani pertumbuhan pelanggan sebesar 6,28% tahun depan atau setara 1,35 juta pelanggan baru. Untuk itu, PLN menyiapkan dana alokasi yang jumlahnya sekitar Rp5 triliun.

Direktur Niaga dan Pelayanan PLN Sunggu Anwar Aritonang mengemukakan hal itu ketika ditemui di Gedung Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jakarta, akhir pekan lalu.

Menurut Sunggu, dengan masuknya tiga pembangkit baru berbahan bakar non-BBM yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cilacap, PLTU Tanjung Jati B, dan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Cilegon, investasi yang disiapkan untuk tahun depan akan terserap sesuai peruntukan. Tahun ini, akibat tingginya harga BBM, separuh investasi yang disiapkan untuk jaringan PLN tersedot ke pos pengeluaran bahan bakar.

"Pada 2006 ini, dari Rp5 triliun investasi yang kami siapkan, hanya sekitar Rp2,1 triliun yang bisa terserap sesuai rencana investasi. Sisanya terpaksa kami pakai untuk menutup biaya BBM," ujarnya.

Meski demikian, kata Sunggu, PLN ternyata masih sanggup memenuhi penyambungan baru bagi sekitar 1,6 juta pelanggan tahun ini, lebih tinggi daripada rencana yang hanya sekitar 1,3 juta. Pelonjakan jumlah permintaan sambungan baru merupakan salah satu penyebab PLN mengupayakan pemenuhan lebih tinggi dari target.

Sunggu mengatakan harga BBM yang semakin tinggi membuat banyak pelanggan baru dari kelompok bisnis. Mereka sebelumnya mengonsumsi listrik yang dihasilkan sendiri melalui pembangkit listrik berbahan bakar BBM.

Sebagai konsekuensinya, tingkat susut jaringan pun meleset dari target. Sampai akhir semester satu 2006, tingkat susut listrik PLN mencapai 12,6%, sedangkan target susut 10,4%. "Target susut sudah kami revisi menjadi sekitar 11,4%," tuturnya. Total pelanggan PLN hingga akhir 2005 sebanyak 34,44 juta. Dengan rasio elektrifikasi nasional baru mencapai 56%. (Ndy/E-3)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV **DES**
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 **26** 27 28 29 30 31

HALAMAN : 19

TAHUN 2006

Warga Curi Listrik, PLN Depok Rugi Rp6,3 Miliar

DEPOK (SINDO) – Areal Pelayanan Jaringan (APJ) PLN Kota Depok menyatakan bahwa selama 2006 telah ditemukan 2.970 kasus pencurian listrik. Akibatnya, PLN mengalami kerugian Rp6,3 miliar. Kebanyakan pencurian itu dilakukan masyarakat untuk keperluan rumah tangga.

“Dari sejumlah kasus pencurian yang kami temukan, kebanyakan pencurian dilakukan masyarakat rumah tangga, khususnya di wilayah Kecamatan Sawangan,” kata Manajer APJ PLN Depok Hadi Suhana.

Menurut Hadi, modus pencurian dilakukan dengan cara mencantolkan kabel pada tiang instalasi listrik yang terpasang di tengah permukiman. Kendati demikian, Hadi mengaku, jika dibandingkan dengan 2005 lalu, kasus pencurian mengalami penurunan. Tahun lalu, kasus pencurian listrik mencapai 9.798 kasus.

Artinya, kata Hadi, PLN telah berhasil menekan ang-

ka kerugian akibat pencurian listrik dari tahun sebelumnya. Pada 2005, kerugiannya mencapai Rp10,7 miliar atau kecolongan 18,5 juta kwh. Tahun ini, kerugiannya hanya Rp6,3 miliar atau kecolongan 11,5 juta kwh.

Tahun ini, kata Hadi, PLN juga berhasil mengungkap tindak pencurian yang dilakukan dua pabrik hingga kerugian mencapai Rp800 juta. Modusnya dengan mengubah sistem pengukur meteran listrik atau dengan cara mengambil aliran dari tiang listrik setempat. Saat ini, proses hukum terhadap kedua pabrik itu masih berjalan di pengadilan.

Perlu diketahui, pencurian instalasi listrik di Kota Depok cukup marak. Karena itu, APJ PLN Depok bersama Polrestro Depok pada Agustus lalu melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang kerja sama mengamankan instalasi dan menertibkan pemakaian tenaga listrik. (adam prawira)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV **DES**
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 **26** 27 28 29 30 31

HALAMAN : 7

TAHUN 2006

PLN Batasi Laju Pertumbuhan Listrik

JAKARTA - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN Persero) mempertahankan laju pertumbuhan pelanggan sebesar 6,28% per tahun atau sekitar 1,35 juta pelanggan. Saat ini pelanggan PLN untuk semua kategori mencapai 34 juta pelanggan.

Direktur Niaga dan Pelayanan PLN Sunggu Anwar Aritonang mengatakan, pertumbuhan pelanggan tersebut sudah termasuk penyambungan baru. "Kami akan pertahankan pertumbuhan pelanggan per tahun sekitar 1,35 juta pelanggan," katanya pada wartawan, di Jakarta pekan lalu.

Aritonang mengatakan, tahun ini target 1 juta pelanggan terlampaui. "Ada indikasi banyak orang yang beralih menjadi pelanggan PLN pascakenaikan harga bahan bakar minyak," jelasnya.

Menurut dia, target tersebut akan didukung dengan penurunan susut jaringan (*losses*) yang untuk tahun depan ditargetkan bisa turun menjadi 10,4%. Untuk tahun ini pihaknya merealisasikan susut 11,4% atau sesuai target yang tercantum dalam rencana kerja anggaran perusahaan (RKAP) 2006.

Investasi 2007

Diakuinya, penurunan susut jaringan sangat tergantung besarnya investasi. Pada 2006 misalnya pihaknya terpaksa merevisi target susut jaringan dalam RKAP dari 10,2% menjadi 11,4%. "Ini karena investasi susut yang besarnya Rp 5,4 triliun, sebanyak Rp 2,1 triliun terpaksa digunakan untuk beli BBM," tegasnya.

Karena itu, kata Aritonang, untuk 2007 investasi susut yang besarnya Rp 5 triliun bisa terserap seluruhnya. "Kami berharap semua dana tersebut bisa untuk menurunkan susut, kami optimistis karena 3 pembangkit batubara telah masuk ke sistem, yakni pLTU Cilegon, Cilacap, dan Tanjung Jati B," jelasnya.

Dia mengatakan, dengan terserapnya seluruh investasi susut dipastikan kondisi jaringan juga makin membaik, sehingga bisa mendukung pencapaian target 1,35 juta pelanggan. "Kami harapkan target ini bisa, apalagi jika setiap pelanggan bisa menghemat 50 watt saja, itu bisamengurangi lonjakan beban puncak," tegasnya. (ari)

LB

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input checked="" type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>
KODE : <input checked="" type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA <input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> MIGAS DAN PANAS BUMI <input type="checkbox"/> UMUM	
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
HALAMAN : 2 TAHUN 2006	

ENERGI

PLN Kembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu di Nusa Penida

JAKARTA (Media): PT PLN Distribusi Bali berusaha merangkul investor untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga (PLT) Bayu (angin) di Kepulauan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Bali.

"Tahap pertama PLN sudah berhasil mengembangkan 80 kilowatt (kw). Diharapkan segera menyusul tahap kedua dan ketiga," kata Humas PT PLN Distribusi Bali Wayan Redika, di Denpasar, kemarin.

Wayan mengatakan PLT Bayu tahap pertama telah terealisasi pada 2005 dan tahap kedua berkapasitas 80 kw diharapkan bisa dirampungkan dalam tahun ini. Sedangkan tahap ketiga diharapkan bisa terealisasi pada 2007 dengan kapasitas 1.000 kw untuk memenuhi harapan masyarakat akan pelayanan listrik di daerah tersebut.

Nusa Penida ialah satu pulau yang terpisah dengan daratan Bali, namun secara administratif masuk wilayah Kabupaten Klungkung. Sebagian masyarakat di daerah itu kini terjangkau pelayanan listrik.

Wayan menjelaskan pihaknya berhasil membangun jaringan interkoneksi yang menjangkau tiga pulau di Kecamatan Nusa Penida berkapasitas 5,97 megawatt (Mw).

Kapasitas energi listrik tersebut bersumber dari PLTD Kutampi 4,30 Mw, PLTD Jungut Batu 0,87 Mw, dan PLTD Bayu 80 Kw. Jaringan interkoneksi yang dibangun tersebut menjangkau jarak 1,3 km dengan kondisi yang sangat sulit, karena harus menembus tebing curam dengan ketinggian 100 meter di pinggir pantai.

Biaya pembangunan jaringan interkoneksi yang menghubungkan Pulau Nusa Penida-Pulau Nusa Lembongan, dan Pulau Nusa Ceningan seluruhnya Rp4 miliar.

Wayan menambahkan jaringan interkoneksi tersebut mampu melayani masyarakat di tiga pulau terpencil itu. Termasuk kebutuhan layanan listrik oleh para investor pariwisata di sana.

Adanya pelayanan listrik di ketiga Pulau Nusa tersebut sejak akhir Desember 2005 mendapat sambutan positif dari masyarakat maupun pengusaha yang sejak lama mendambakan pelayanan kelistrikan.

Ketiga pulau kecil yang memiliki keindahan alam bawah laut itu dalam beberapa tahun belakangan menjadi incaran investor untuk menanamkan modalnya dalam bidang jasa kepariwisataan. (Ant/E-3)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV **DES**
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 **26** 27 28 29 30 31

HALAMAN : 7

TAHUN 2006

Interkoneksi dan Penanganan Krisis Listrik

Di sejumlah wilayah, kondisi krisis listrik nampaknya sudah menjadi sesuatu yang dianggap wajar terjadi. Namun, bukan berarti tak ada upaya yang dilakukan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk mengatasi hal tersebut. Seperti yang terjadi di Sumatera. Wilayah ini, meski dikategorikan sebagai Lumbung Energi, namun pasokan listriknya bisa dikatakan masih *byar pet*. Ambil contoh, krisis energi listrik yang terjadi pada subsistem Sumatera Bagian Utara berkisar 100-120 MW. Ini belum termasuk bila terjadi gangguan ataupun pemeliharaan mesin pembangkit, yang untuk mengatasinya dengan cara menyalurkan kelebihan pasokan daya dari sub sistem Sumatera Bagian Selatan sebesar 60-80 W.

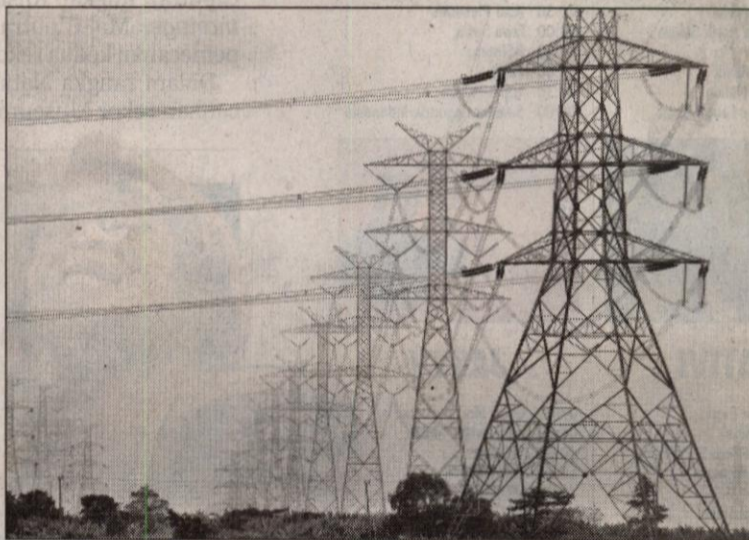
Salah satu upaya yang dilakukan PLN adalah dengan membangun interkoneksi transmisi jalur Rantau Prapat-Kota Pinang-Bagan Batu berkapasitas 150 kV, di samping upaya lainnya yakni perbaikan PLTU Unit 3 Belawan serta dukungan pasokan listrik dari PT Inalum sekitar 50-100 megawatt.

Pembangunan proyek ini direncanakan selesai dan dapat beroperasi pada Oktober 2007. "Semula

interkoneksi ini dijadwalkan beroperasi pada Desember 2007," kata Direktur Transmisi dan Distribusi PLN Herman Darnel Ibrahim. Namun, sambungnya, dengan kondisi pemadaman di Wilayah Sumatera Utara maka pembangunan dipercepat dan target beroperasi pada akhir Oktober 2007.

Sebelum interkoneksi ini terjadi, kekurangan daya pasokan listrik juga diantisipasi dengan menyewa pembangkit listrik diesel. GM Pembangkitan Sumbagut, Albert Pangaribuan, mengatakan pihaknya membuka kesempatan bagi pengusaha yang bisa menyewakan genset. Daya yang dibutuhkan mencapai sekitar 65 megawatt (MW). Jika pendirian Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dari Rantau Prapat hingga Bagan Batu rampung dibangun maka jaringan interkoneksi wilayah Sumatera telah seluruhnya tersambung. Meskipun untuk sementara interkoneksi ini baru akan memenuhi pasokan listrik wilayah Sumbagut.

Biaya yang dikucurkan untuk pembangunan interkoneksi ini sebesar Rp 239,77 miliar, yang didanai dari APBN sebesar 117,88 miliar dan dari anggaran PLN sebesar Rp 121,89 miliar. Herman menjelaskan, pekerjaan konstruksi dimulai pada Desember



Investor Daily/TINO OKTAVIANO

2006 melalui kegiatan pembangunan pondasi menara mulai dari Rantau Prapat-Kota Pinang-Bagan Batu sebanyak 390 pondasi menara. Ini dilaksanakan dalam dua bagian pekerjaan terpisah serta bekerja secara paralel.

Dari sejumlah 390 tower, yang melintasi areal PT Perkebunan Nusantara II berjumlah 145 tower, perkebunan swasta 44 tower, dan masyarakat 200 tower serta Dinas Peternakan satu tower. Saat ini, beban puncak pada subsistem Sumatera Bagian Utara adalah 1.070

MW, sedangkan daya mampu yang tersedia hanya sebesar 950 MW,

Dengan beroperasinya interkoneksi SUTT 150 kV Sumatera, maka biaya pokok produksi listrik dengan pembangkit menggunakan BBM di Sumbagut dapat dihemat sebesar Rp 65-78 miliar per tahun. Ini disebabkan di subsistem Sumbagsel lebih mahal karena mayoritas mengandalkan pembangkit nonBBM (PLTA, PLTU). Sementara di sistem Sumbagut masih dominan menggunakan BBM.

Jumlah pelanggan PLN di

Wilayah Sumatra Utara saat ini ada 2.239.660 pelanggan, di mana 2.062.643 adalah pelanggan rumah tangga (sebesar 94,04%), sedangkan sisanya pelanggan industri kecil dan besar. Dalam mengatasi pemadaman, yang menjadi prioritas adalah industri dulu, baru masyarakat. Untuk jangka menengah panjang, akan dilakukan penambahan kapasitas dengan membangun sistem interkoneksi dan pembangkit sebesar 275 Kv yang terbagi dalam beberapa proyek.

Untuk proyek Payakumbuh dan Padang Sidempuan, Japan Bank for International Cooperation (JBIS) telah menyatakan komitmen pendanaannya. Sedangkan pembangkit listrik di Sibolga dan Sarula, negosiasi dengan pihak swasta masih terus berjalan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Purnomo Yusgiantoro, mengatakan pembangunan jaringan transmisi 150 kV yang menghubungkan subsistem Sumbagsel ke subsistem Sumbagut itu diharapkan dapat menyalurkan energi listrik yang sangat dibutuhkan dalam menggerakkan roda perekonomian. Dengan demikian, keluhan *byar pet* di wilayah ini secara pelan namun pasti, bisa teratasi. **(happy amanda amalia)**

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV **DES**
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 **(24)** 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 5

TAHUN 2006

KETENAGALISTRIKAN

PLN Tawarkan 30 Proyek Pembangkit di Luar Jawa

JAKARTA (Suara Karya): PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) kembali menawarkan 30 proyek pembangunan pembangkit listrik di luar Jawa dengan kapasitas 100 hingga 150 megawatt (MW) dan 5 hingga 50 MW. Penawaran proyek pembangkit listrik tersebut juga berkaitan dengan proyek percepatan pembangunan pembangkit (*crash program*) PLN sebesar 10.000 MW yang ditargetkan dioperasikan pada akhir 2009.

Direktur Utama PLN Eddie Widiono mengatakan, rencana pembangunan pembangkit listrik itu mulai Nanggroe Aceh Darussalam hingga Papua. Pembangkit listrik berdaya 100-150 Mw akan dibangun di 5 lokasi, masing-masing 2 unit di Nanggroe Aceh Darussalam, di Sumatera Utara 1 unit, dan 2 unit di Lampung.

Sedangkan untuk kapasitas 5-50 MW akan dibangun sebanyak 25 pembangkit yang berlokasi di Bangka-Belitung, Riau, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Sebanyak dua unit pembangkit akan dibangun di wilayah Riau berdaya 5 MW, wilayah Papua dengan satu unit berdaya 7 MW, serta 2 unit di wilayah Kalimantan Barat berdaya 50 MW. "Sekitar 30 lokasi di luar Jawa dengan kapasitas bervariasi ditawarkan ke publik," kata Eddie saat acara pertemuan sektor energi dengan delegasi Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional China (NDRC) dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro.

Eddie juga menjelaskan, untuk pembangkit berlokasi di Jawa-Madura-Bali sebesar 6.900 MW akan memasuki tahap penandatanganan kontrak. Antara lain, PLTGU Banten 1 (Suralaya) dan Jawa Timur 2 (Paiton) berkapasitas 600 MW yang telah diumumkan pemenangnya itu akan ditandatangani pada 19 Januari 2007.

Sedangkan untuk PLTGU Jawa Tengah 1 Rembang berdaya 300 MW, lanjut Eddie, dalam tahap evaluasi dan akan ditandatangani kontraknya pada 26 Januari 2007. Selanjutnya, menyusul Banten 2 (Labuan), Jawa Barat 1 (Indramayu) dan Jawa Timur 1 (Tanjung Awar-Awar) berkapasitas 300 MW penandatanganan kontak rencananya akan dilaksanakan pada Februari 2007.

Kemudian pembangkit berdaya 300 MW berlokasi di Banten 1 (Teluk Naga), Jawa Barat 2 (Pelabuhan Ratu), Jawa Timur 1 (Pacitan) baru memasuki tahap pra kualifikasi pada 27 Desember 2006 mendatang. (Abdul Choir)